BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan perekonomian Indonesia melemah di mata dunia. Apabila perekonomian Indonesia melemah maka kemiskinan mulai merajalela di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu persoalan kompleks dan merupakan isu yang tidak akan pernah habis sampai saat ini baik di Negara Maju maupun Negara Berkembang. Tingkat kemiskinan pada setiap negara pun berbeda-beda. Negara Berkembang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Sistem pemerintahan bisa jatuh apabila masyarakat miskin dibiarkan berlarut-larut dan semakin parah. Oleh karena itu, dalam menangani masalah kemiskinan yang terjadi tersebut pada dasarnya setiap Negara memiliki konsep-konsep dan cara-cara tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Kulon Progo merupakan Kabupaten di DIY yang menduduki peringkat dua terakhir dalam kesejahteraan masyarakatnya.[1] Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2011

[1] Abrerd, Felix. *Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.* Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial UNY.2015 (Abrerd, 2015)

angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo adalah 23,62%, angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta 16,08% dan angka kemiskinan nasional sebesar 12,49%. Pada tahun 2012 angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 23,22% akan tetapi angka tersebut tetap lebih tinggi dibanding rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta 15,88% dan angka kemiskinan nasional sebesar 11,66%.

Menurut Badan Pusat Statistik Yogyakarta Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 2014-2015, jumlah total penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo mencapai 84,67 (20,64%) mengalami penurunan dari Tahun 2014 dimana angka kemiskinan pada tahun 2014 sejumlah 86,50.[2] Pada setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2015 angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terus menurun dengan stabil. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo ini adalah salah satu hasil dari upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya.

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inovasi sebagai perwujudan Pemerintah Daerah dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan

[2]https://yogyakarta.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/10, diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 22.00 WIB (Table Dinamis, t.thn.)

potensi lokal.[3] Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai komitmen terhadap pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, kepentingan, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu Kabupaten Kulon Progo memiliki visi *"Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang Sehat, Mandiri, Berprestasi, Adil, Aman dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa"* yang dimaknai mewujudnya Kulon Progo yang sehat, mandiri dan berprestasi menuju masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah sudah seharusnya membimbing masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mewujudkan visi tersebut bersama-sama. Salah satu upaya pemerintah demi terlaksananya visi tersebut yaitu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, karena seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum tercukupkan kebutuhan kesehatan dan perekonomiannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dengan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Demi terlaksananya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang maksimal untuk Kabupaten Kulon Progo khususnya, terbentuklah Keputusan Bupati Nomor 325 Tahun 2010 tentang Pembentukan TKPK Kabupaten Kulon Progo yang dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, Pemerintah

[3] Kurnia Rifqi Febrian. *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Mewujudkan Program Bela Beli Kulon Progo.* Skripsi S1, Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016 (Febrian, 2016)

Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan supaya dalam pelaksanaannya penanggulangan kemiskinan tetap sesuai dengan aturan hukum dan peraturan-peraturan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 BAB V tentang Startegi Penanggulangan Kemiskinan Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan melalui : (a) kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor policy)* dan (b) melindungi masyarakat agar tidak jatuh miskin *(against poor policy)*. Berdasarkan dengan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki inovasi kebijakan *pro poor policy* dan *against poor policy* dalam penanggulangan kemiskinan khususnya pada pemberdayaan masyarakat di Kulon Progo yaitu *"Gerakan Bela-Beli Kulon Progo"*. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo konsisten untuk terus melakukan upaya pengetasan kemiskinan, langkah nyata yang diambil adalah dengan mengupayakan kemandirian ekonomi bagi rakyatnya, "Bela dan Beli Kulonprogo" itulah spiritnya, sebuah gerakan untuk mengangkat perekonomian daerah dengan langkah menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di pasar sendiri ditengah gempuran produk asing di era globalisasi dan pasar bebas.[4]Gerakan Bela Beli Kulon Progo merupakan salah satu program *pro rakyat, pro poor policy* dan *against poor* policy yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten

[4]http://beliindonesia.com/?p=2305, diakses pada 22 Maret 2017, pukul 10.45 WIB (Bela-Beli Kulon Progo, 2015)

Kulon Progo. Inisiatif Bela dan Beli Kulon Progo merupakan semboyan untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri ketimbang produk asing.[5] Program ini merupakan gerakan untuk membeli dengan cara membeli produk-produk lokal yang dipunyai di wilayah barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.[6] Strategi Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sangat menarik, masyarakat daerah diajak untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk lokal.[7]

Semangat Bela-Beli Kulon Progo merupakan semangat untuk membebaskan masyarakat Kulon Progo dari kaum kapitalis.[8] Program Gerakan Bela Beli Kulon Progo ini telah resmi diluncurkan pada 25 Maret 2013 yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 117 Tahun 2013 sebagai konsep aplikatif untuk menumbuh-kembangkan aktivitas perekonomian masyarakat Kulon Progo menuju tatanan perekonomian rakyat yang memiliki bobot kemandirian.[9] Gerakan Bela-Beli Kulon Progo bertujuan untuk membangun kepercayaan publik tentang potensi Kulon Progo.

---

[5] http://www.tifafoundation.org/terobosan-terobosan-bupati-kulon-progo/ diakses pada 22 Maret 2017, pukul 10.10 WIB (Terobosan-terobosan Bupati Kulon Progo, 2015)

[6] http://news.detik.com/berita/3102031/bela-beli-kulonprogo-spirit-dan-sukses-bupati-hasto-angkat-produk-lokal, diakses pada 22 Maret 2017, pukul 10.25 WIB**Invalid source specified.**

[7] Op.cit. Skripsi S1 (Febrian, 2016)

[8] www.kulonprogokab.go.id/v21/Ikrar-Gerakan-Beli-Kulon-Progo--Bela-Kulon-Progo_2673, diakses pada 6 Maret 2017, pukul 23.22 WIB**Invalid source specified.**

[9] Hasto Wardoyo. *Praktek Sederhana Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Ptogo.* Hal.5 (Wardoyo, 2015, hal. 5)

Gerakan Bela Bali Kulon Progo sendiri memiliki beberapa program dan kegiatan diantaranya yaitu :

a. Motif Batik Khas Kulon Progo (Batik Gebleg Renteng)
b. RASDA (Beras Daerah)
c. Beras PNS
d. Air-Ku
e. TOMIRA (Toko Milik Rakyat)

Meskipun program-program dari kebijakan Bela-Beli Kulon Progo ini merupakan program yang sudah diakui oleh negara dan mendapatkan beberapa penghargaan, tetapi ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut. Pada pelaksanaan Batik Gebleg sendiri ternyata sistem manajerial dalam pengelolaannya sangat sederhana dan belum ada pengembangan yang dapat meningkatkan aktivitas produksi dan meningkatkan keuntungan.[10] Begitu pula dengan program penggunaan beras asli daerah yaitu Beras Daerah (RASDA) dan Beras PNS, meskipun inovasi program ini sudah bagus akan tetapi ada beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi program ini adalah bagaimana mewujudkan pemenuhan kebutuhan beras untuk Raskin/Rastra di Kulon Progo dapat dipenuhi secara keseluruhan dari beras yang berasal dari Gapoktan di Kulon Progo sendiri.[11]

---

[10] Elson G Budi Susilo. *Kajian Implementasi Bela-Beli Kulon Progo (Kasus: Air-KU, Batik Gebleg Renteng, dan Tomira).* Skripsi S1, Pembangunan Wilayah. Universitas Gadjah Mada. 2017. Hlm.77 (Susilo, 2017)

[11] http://diklat.jogjaprov.go.id/v2/kegiatan/artikel/item/183-revitalisasi-rasda-kulon-progo-mempersiapkan-dukungan-kegiatan-dan-penguatan-sistem-pengadaan-beras-gapoktan, diakses pada 26 Desember 2017, pukul 15.34 WIB (Revitalisasi Rasda Kulon Progo, 2016)

Pada tahun 2014, Gapoktan di Kulon Progo sepakat untuk memasok 3.600 ton dari total kebutuhan 7.700 ton lebih, tetapi ternyata Gapoktan baru bisa memenuhi beras 4.000 ton/bulan sedangkan kebutuhan BULOG untuk Kulon Progo sebanyak 6.000 ton/bulan sehingga belum seluruh rumah tangga miskin di Kulon Progo mendapat distribusi RASDA.[12] Selain itu terdapat keluhan pada kualitas beras yang kurang baik dan juga ada rumor dari masyarakat yang mengindikasikan bahwa tidak semua beras yang diadakan oleh Gapoktan berasal dari daerah Kulon Progo tetapi sebagian berasal dari luar Kulon Progo yang disediakan pedagang.[13]

Kendala dari program Air-Ku sendiri antara lain adalah tahapan produksi yang masih relatif sulit dan produksi yang masih hanya direncanakan untuk Kulon Progo, kemasan Air-Ku masih didatangkan dari luar Kulon Progo dan juga Sumber Daya Manusia yang masih relatif rendah karena hanya terdapat 10 (sepuluh) pekerja di pabrik dan upah pegawai yang masih kecil.[14] Kemudian kendala yang ditemukan dari program TOMIRA ini bahwa koperasi-koperasi belum mampu berjalan sendiri untuk mengelola Alfamart dan Indomart sepenuhnya, dengan kata lain masih sangat ketergantungan dengan Alfamart dan Indomart dari sisi manajemen toko.[15]

---

[12] R. Rahman A. Fandaru. *Desain Baru Program Raskin (Analisis Pelaksanaan RASDA di Kabupaten Kulon Progo).* Thesis S2, Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada. 2016. Hlm 10 (Fandaru, 2016)
[13] Ibid., (Fandaru, 2016)
[14] Elson,op.cit.,hlm.75 (Susilo, 2017, hal. 75)
[15] Ibid.,hlm78 (Susilo, 2017, hal. 78)

Program-program tersebut belum mampu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh dalam sisi ekonomi dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perbaikan pemberdayaan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam Gerakan Bela Beli Kulon Progo yang belum optimal juga menjadi faktor lain dalam pelaksanaan Program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Program ini belum melibatkan partisipasi masyarakat secara luas sehingga dampaknya pun belum terlalu signifikan dalam menakan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.[16]

Faktor dari keterbatasan sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan anak yang kurang atau bahkan tidak terjamin karena keterbatasan biaya maupun kurangnya motivasi dalam menjalani jenjang pendidikan. Faktor tersebut menyebabkan kurangnya ketrampilan pada masyarakat sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran pada usia kerja. Tak jarang faktor politik menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan yang ada di suatu negara maupun suatu daerah. Pada suatu permasalahan kebijakan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan justru menjadi penyebab kemiskinan yang berkelanjutan. Hal ini bisa saja terjadi apabila kebijakan pemerintah tidak berdasarkan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap program-program yang dijalankan pun juga dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang berkelanjutan.

[16]Felix,op.cit.,hal.5 (Abrerd, 2015, hal. 5)

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang di aplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).*[17] Penduduk dengan tingkat pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan yang berada dibawah garis kemiskinan maka dapat disebut sebagai penduduk miskin. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Program *"Gerakan Bela Beli Kulon Progo"* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik suatu rumusan msalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi program *"Gerakan Bela-Beli Kulon Progo"* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan program *"Gerakan Bela-Beli Kulon Progo"*?

[17]Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kulon Progo. *Panduan Penanggulangan Kemiskinan*. 2014. Kulon Progo hlm 5 (TKPK, 2014)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi program *"Gerakan Bela-Beli Kulon Progo"* di Kabupaten Kulon Progo serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan publik, terlebih untuk program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam peng-implementasian kebijakan publik dan wawasan ilmu pengetahuan khusunya program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

E. Kerangka Dasar Teori

Landasan teori berisi teori-teori yang akan digunakan dalam suatu penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Dengan demikian dalam penelitian ini, dasar-dasar teori yang akan digunakan untuk menunjang penelitian ini antara lain :

1. Teori Kebijakan Publik

Pada sistem pemerintahan, selain birokrat dan lembaga publik juga terdapat suatu rumusan kebijakan publik yang mempresentasikan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Perumusan kebijakan publik sendiri harus memperhatikan tujuan dari pemerintah dan fenomena sosial masyarakat yang ada dalam lingkungan tersebut.

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh elemen dalam suatu negara pada tataran strategis yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik yang bertindak atas nama rakyat yaitu birokrasi pemerintah.[18]

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, apapun yang di pilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Menurut Carl I. Friedrick kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk

[18] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Jakarta, Penerbit Grasindo, 2005 (Nurcholis, 2005)

memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.[19]

Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu.[20] Dari beberapa pendapat ahli tentang kebijakan publik diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan pemerintah dengan mempertimbangkan fenomena sosial masyarakat yang terjadi terkait dengan keputusan pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Kebijakan publik merupakan jalan mencapai tujuan bersama yang sudah dicita-citakan.

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat jenis-jenis dari kebijakan publik, antara lain :[21]

1) Kebijakan publik adalah makna dari kebijakan publik itu sendiri, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.
2) Kebijakan publik adalah bentuknya. Dalam arti luas kebijakan publik dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu (a) kebijakan

[19] Riant Nugroho D, *KEBIJAKAN PUBLIK; Formuluasi, Implementasi, dan Evaluasi,* Jakarta,Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2003, Hal.4 (Nugroho, 2003)
[20] Ibid., (Nugroho, 2003)
[21] Ibid.,hal.54-61. (Nugroho, 2003, hal. 54-61)

publik dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam peraturan perundangan, dan (b) peraturan yang tidak tertulis tetapi disepakati disebut sebagai konvensi. Berikut bentuk-bentuk kebijakan publik yaitu :

a) Kebijakan publik tertinggi yang dibuat oleh lembaga legislatif. Kebijakan publik tertinggi yang dibuat oleh legislatif ini merupakan prinsip dasar dari Teori Politik *Trias Politica.*
b) Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dengan eksekutif. Permasalahan dengan kompleksitas yang besar tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri dalam perumusan kebijakan publik, oleh karena itu legislatif dan eksekutif bekerja sama dalam perumusan kebijakan publik.
c) Kebijakan publik yang hanya dibuat oleh eksekutif. Dalam perkembangannya karena semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan maka peran eksekutif tidak cukup hanya menjadi pelaksana saja akan tetapi dapat merumuskan kebijakan publik sendiri.

Adapun metodologis tentang siklus sistematik dari kebijakan publik:[22]

[22] Ibid.,hal.73-74. (Nugroho, 2003, hal. 73-74)

Bagan 1. Kebijakan Publik

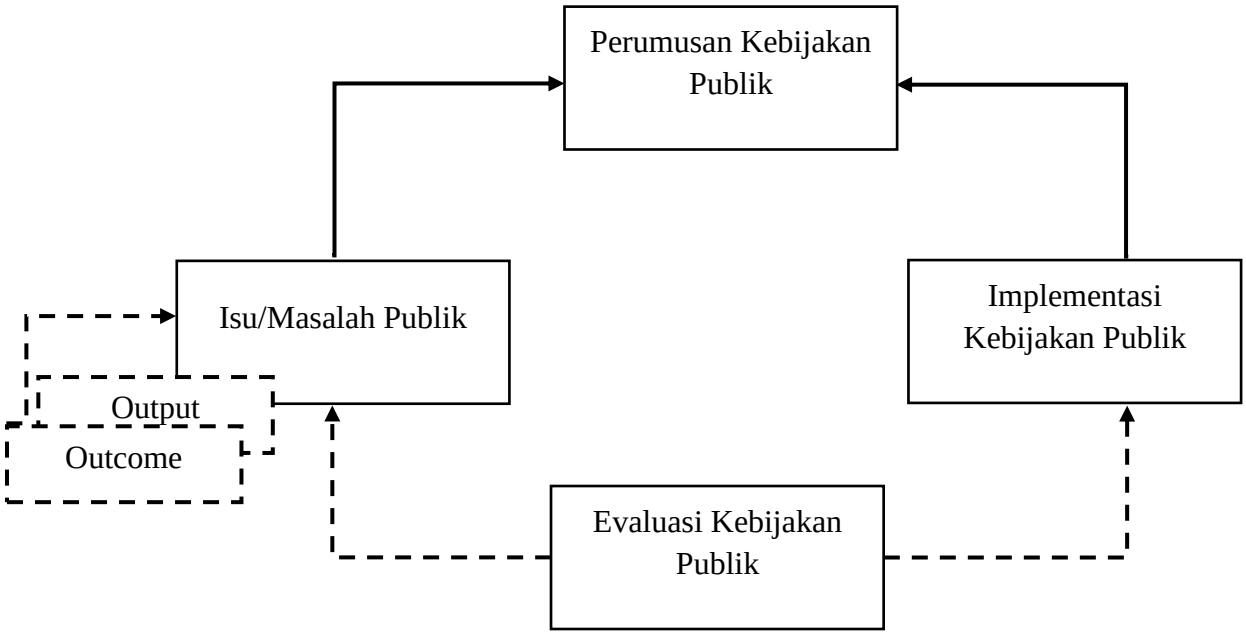

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut :

a) Terdapat isu atau masalah publik. Hanya bisa disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersamanya, berjangka panjang dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik.

b) Dari isu tersebut menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah/isu tersebut. Rumusan kebijakan ini

akan menjadi hukum bagi seluruh warga negara dan juga pimpinan negara.

c) Setelah dirumuskan kemudian kebikajan publik ini dilaksanakan oleh seluruh elemen negara baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama dengan masyarakat.

d) Dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

e) Impelementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang berupa kebijakan maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan.

f) Dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang dicapai dengan kebajikan tersebut.

Dengan melihat skema diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu (a) Perumusan Kebijakan; (b) Implementasi Kebijakan; dan (c) Evaluasi Kebijakan.

Dalam perumusan kebijakan publik terdapat pula elemen-elemen dari sistem kebijakan publik, yaitu :[23]

Bagan 2. Elemen Sistem Kebijakan Publik

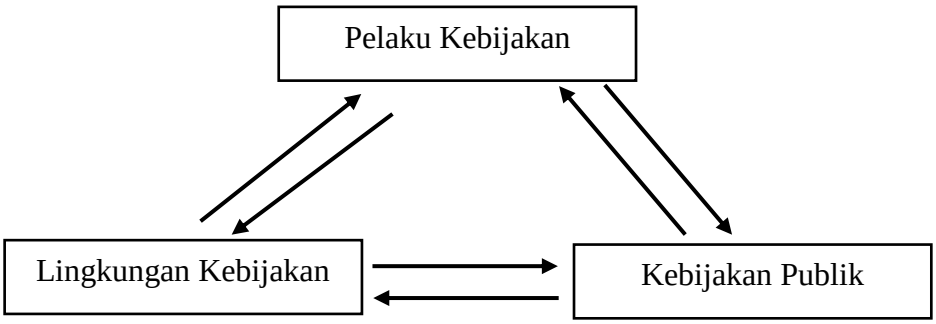

Dalam skema elemen sistem kebijakan publik diatas William Dunn menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik sendiri merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Pelaku kebijakan yaitu aktor birokrat dan juga elemen masyarakat. Sedangkan lingkungan kebijakan merupakan tempat timbulnya masalah atau isu, yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publiknya. Meskipun sistem kebijakan merupakan suatu produk subyektif yang diciptakan oleh pelaku kebijakan untuk mengatasi masalah, akan tetapi sistem kebijakan juga merupakan realitas obyektif dalam bentuk tindakan dan akibat yang nyata. Hal tersebut menunjukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat terlepas dari ketiga komponen diatas. Karakteristik kebijakan

[23] Dunn, N. William, Analisa Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta, PT Hanindita Graha Widya,1988,hal.65. (Dunn, 1988)

publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus seusai dengan kondisi sosial masyarakat dikarenakan masyarakat merupakan target dari kebijakan itu sendiri.

2. Gerakan Bela-Beli Kulon Progo

Program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan salah satu implementasi dari Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016. Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu *Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa.* Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut Bupati Kabupaten Kulon Progo, Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG mengeluarkan kebijaka *pro-rakyat* yakni ikrar yang juga merupakan salah satu program kebijakan Kabupaten Kulon Progo yaitu *Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengikrarkan *Gerakan Bela-Beli Kulon Progo* pada tanggal 25 Maret 2013 yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 117 Tahun 2013. Gerakan ini merupakan wujud keberpihakan dan pembelaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada seluruh komponen yang ada baik Petani, UMKM, Koperasi, BUMD, Perusahaan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan, menggunakan, mengonsumsi, membeli, dan

mengembangkan serta mencintai produk-produk lokal dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang mandiri.[24]

Bupati Kabupaten Kulon Progo Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG menjelaskan bahwa *Gerakan Bela-Beli Kulon Progo* merupakan semangat pembelaan yang ditujukan oleh seluruh masyarakat, tokoh, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap kepentingan untuk menumbuhkan perekonomian Kulon Progo secara konkrit.[25] Dari penjelasan Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan kebijakan publik yang mengajak masyarakat untuk membangun pereokoniam Kulon Progo yang bertujuan agar masyarakat mau membela daerahnya sendiri dengan memproduksi dan mengkonsumsi produkdi-produksi dari daerahnya sendiri yaitu Kabupaten Kulon Progo.

Bapak Drs. Aryadi, MM sebagai Kepala Bagian Humas dan TI Kabupaten Kulon Progo menyampaikan bahwa :[26]

> "Tujuan dari *Bela-Beli Kulon Progo* adalah sebagai pondasi untuk menghadapi MEA, sebagai ketahanan di bidang ekonomi, sandang, papan, dan pangan sehingga diharapkan angka kemiskinan di Kulon Progo dapat menurun seperti apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Kulon Progo."

---

[24] http://sriwahyuniarto.blogspot.co.id/2016/03/bela-beli-kulon-progo-sebuah-inovasi.html diakses pada 25 Juli 2017, pukul 13.36 WIB (Bela-Beli Kulon Progo Sebuah Inovasi, 2016)

[25] http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Ikrar-Gerakan-Beli-Kulon-Progo--Bela-Kulon-Progo_2673 diakses pada 25 Juli 2017, pukul 13.39 WIB (Ikrar Gerakan Beli Kulon Progo Bela Kulon Progo, 2013)

[26] Zam Basir Angga Wibisono. *Strategi Kampanye Public Relations Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Program Bela-Beli Kulon Progo.* Skripsi S1, Ilmu Komunikasi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Wibisono, 2017)

3. Implementasi Kebijakan

Grindle (1980:7) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program telah tersusun, dan dana yang sudah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Lane juga mengungkapkan bahwa implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil sebagai akibat.[27]

Edward III (1980:10) menyatakan bahwa impelemntasi kebijakan adalah fase yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, fase ini menjadi tahap yang sangat krusial karena menyangkut dinamika, problematika yang dihadapi sehingga berimbas kepada dampak dan tujuan dari kebijakan publik. Oleh karena itu dibutuhkan proses implementasi yang efektif, tanpa adanya implementasi yang efektif, kebijakan yang dibuat tidak akan berhasil.[28]

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2006:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang

---

[27] Haedar Akib, *"Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana".* Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Makasar, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 (Akib, 2010)

[28] Bachtiar Dwi Kurniawan, *"Impelementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta".* Jurnal Studi Pemerintahan, Vol.2 No.2 Agustus 2011 (Kurniawan, 2011)

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang implementasi kebijakan diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau tindakan pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan untuk mencapai hasil atau tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan model kebijakan untuk menyederhanakan konsep implementasi kebijakan. Berikut beberapa model implementasi kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Model George Edward III

Menurut Edward III implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis, dimana banyak faktor dalam implementasi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Edward III mengungkapkan ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu :[29]

[29] Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebikjasanaan Negara,* Jakarta,Bumi Aksara, 1991, hal. 47 (Wahab, 1991)

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu terhadap komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan berfungsi untuk menghubungkan antara aktor pelaksana kebijakan maupun penyampaian informasi dari pemerintah kepada publik.

b) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal yang sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. Baik sumberdaya manusia (SDM) sebagai pelaksana kebijakan atau sumber dana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan yang pasti diperlukan.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana sangat menentukan terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan dikarenakan perannya sebagai implementor supaya kebijakan dapat tercapai.

d) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah untuk menjalankan dan mengkoordinasikan setiap pelaksana dan jelas atau tidaknya suatu kebijakan. Aspek dari struktur organisasi meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi.

Aspek pertama yaitu mekanisme, dalam implementasi kebijakan pasti sudah ada SOP *(Standart Operational Procedure).* SOP merupakan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan bagi implementor supaya pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai aturan prosedur dan tidak ada hal yang melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua yaitu struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu rumit dan panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

b. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model implementasi yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn ini lebih berada pada model *top-bottomer* atau atas ke bawah dan mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara *linier* dengan kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dapat diambil kesimpulan bahwa Van Meter dan Van Horn memperlihatkan hubungan yang saling mempengaruhi antar faktor.

Van meter dan Van Horn menyebutkan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan, yaitu :[30]

[30] Ibid.,hal.42 (Wahab, 1991, hal. 42)

a) Standar dan tujuan

b) Sumberdaya

c) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor

d) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

e) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

f) Kecenderungan *(disposition)* dari pelaksana/implementor.

Bagan 3. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn

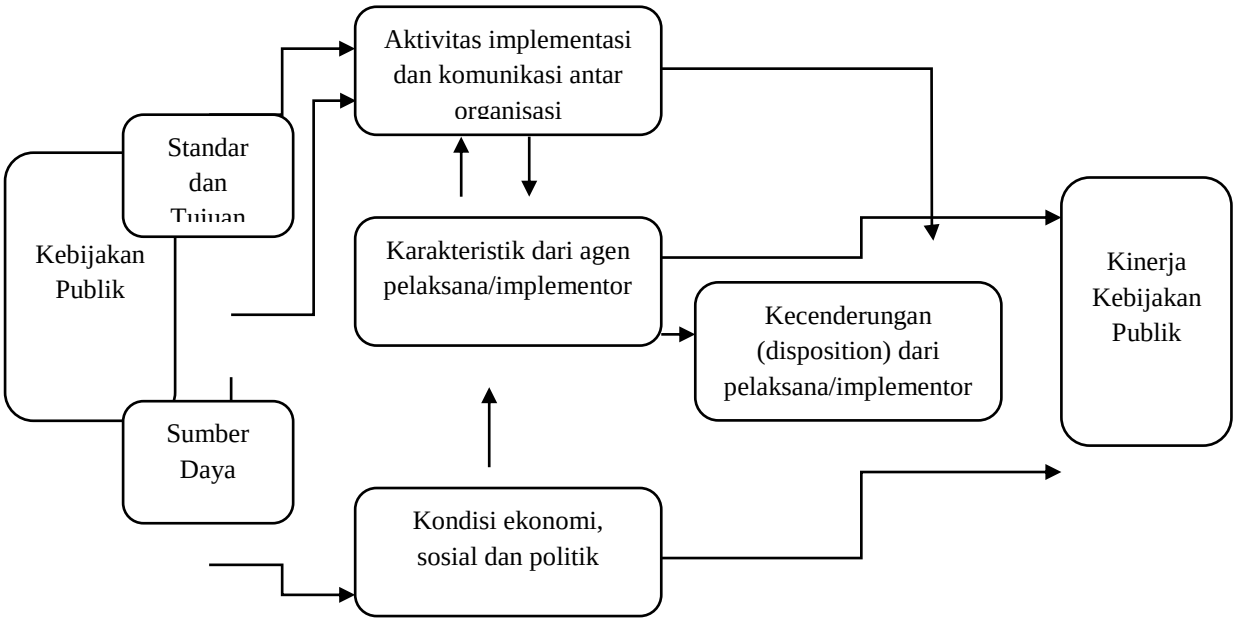

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa suatu kebijakan publik harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas dan terukur sehingga sasaran dari kebijakan publik tersebut dapat dicapai. Kemudian kebijakan publik tidak akan

dapat tercapai apabila tidak adanya sumberdaya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya ekonomi dan juga sumber daya non manusia lainnya dikarenakan kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada sumber daya manusia yang menjalankan dan sumberdaya lain yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan publik tersebut. Salah satu contohnya adalah suatu kebijakan tidak akan terlaksana apabila tidak ada sumber daya ekonomi atau dana yang pengaruhnya tidak kalah besarnya dengan manusia dan sumber daya alam dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian banyak implementasi kebijakan membutuhkan aktivitas implementasi dan hubungan yang baik antar organisasi atau instansi terkait demi keberhasilan program kebijakan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi dan koordinasi merupakan inti dari aktivitas implementasi antar instansi.

Karakteristik agen pelaksana atau implementor sangat mempengaruhi implementasi implementasi dari suatu program kebijakan. Menurut Subarsono keberhasilan program kebijakan dapat dilihat dari karakteristik implementornya yang mana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian kecenderungan dari pelaksana

(*disposition implementor),* disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu : (a) respon implementor, ketertarikan atau kemauan implementor untuk melaksanakan program kebijakan publik; (b) kondisi, pemahaman terhadap kebijakan publik; dan (c) intens disposisi implementor, prefensi nilai yang dimiliki kebijakan publik tersebut. Terakhir dari teori Van Meter dan Van Horn menurut Subarsono, kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi merupakan variabel yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan juga apakah elite politik mendukung atau tidak implementasi kebijakan tersebut.

c. Model Merilee S. Grindle

Model implementasi ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajad *implementability* dari kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan dari model ini mencakup :[31]

[31] Riant,ibid.,hal.175 (Nugroho, 2003, hal. 175)

a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,

b) Jenis manfaat yang dihasilkan,

c) Derajad perubahan yang diinginkan,

d) Kedudukan pembuat kebijakan,

e) Siapa pelaksana program,

f) Sumberdaya yang dikerahkan.

Sementara itu komteks implementasinya adalah:

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

b) Karakteristik lembaga dan penguasa

c) Kepatuhan dan daya tanggap.

4. Program

Terdapat beberapa pengertian atau konsep tentang program yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Cook dan Scioloi setiap program atau proyek yang diturunkan dari kebijakan mempunyai beberapa tujuan dan setiap tujuan dapat dicapai dengan beberapa tindakan. Setiap tindakan mengandung beberapa kriteria untuk mengukur efektivitasnya. Pencapaian tujuan program dengan kriteria efektivitasnya dapat menimbulkan manfaat primer maupun sekunder, sengaja atau tidak disengaja.[32]

[32] Cook dan Scioloi dalam Samudra Wibawa, (dkk), 1994, *Kebijakan publik, Proses dan Analisis,* Jakarta,Intermedia, Hal.6 (WIbawa, 1994)

Menurut Konten daya kerja suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu (kelompok sasaran), program, dan organisasi yang membantu (aparat pelaksana).[33]

Menurut Ibnu Syamsi program adalah perincian dari rencana yang memuat gambaran pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaannya.[34] Dari uraian definisi program dari beberapa ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa program merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penulis menggunakan variabel penelitian dari teori Van Meter dan Van Horn. Van Meter dan Van Horn menyebutkan ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan Teori Van Meter dan Van Horn ini dirasa cocok dengan tema dan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lain sehingga pembahasan tetap pada koridornya dalam

[33] Konten dan Syahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, Hal.240 (Syahrir, 1998)
[34] Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi Manajemen,* Jakarta,Bina Aksara, 1983. Hal.75 (Syamsi, 1983)

arti lain tidak ada pelebaran pembahasan. Adapun definisi konseptual dalam pembahasan ini adalah :

1. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan pemerintah guna menjawab respon tuntutan dengan mempertimbangkan fenomena sosial masyarakat yang terjadi terkait dengan keputusan pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemerintahan itu sendiri.
2. Implementasi Kebijakan adalah suatu proses atau tindakan pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam rangka mencapai hasil atau tujuan dari kebijakan itu sendiri.
3. Program adalah proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bela Beli Kulon Progo meliputi beberapa indikator, yaitu :
    a. Produksi dan pemasaran batik khas Kulon Progo “Batik Geblek Renteng”.
    b. Produksi dan pemasaran “RASDA”.
    c. Pembelian beras asli Kulon Progo oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kulon Progo.
    d. Produksi dan pemasaran “Air-Ku”.
    e. Pendirian “SENKUDAYA” dan “TOMIRA”.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Berikut variabel-variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn, yaitu :

a. Standar dan tujuan
b. Sumberdaya
c. Karakteristik agen pelaksana/implementor
d. Komunikasi antar organisasi
e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
f. Disposisi pelaksana/implementor.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena atau peristiwa interaksi manusia dalam situasi tertentu sesuai dengan

perspektif penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[35] Oleh karena itu pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.[36]

2. Unit Analisis

Sesuai dengan pokok bahasan permasalaham dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah :

a. Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.
b. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
c. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo
d. PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.
e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo.

[35] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian,* Jakarta,Ghalia Indonesia, 1980, Hal.63 (Nasir, 1980)
[36] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung,Remaja Rosda Karya, 2004, Hal.131 (Moleong, 2004)

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dalam proses wawancara berupa keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pelaksanaan program Batik Gebleg Renteng pada tahun 2015.	Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.	Wawancara
Sistem Produksi dan Pemasaran Batik Gebleg Renteng	Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.	Wawancara Observasi
Pelaksanaan program desentralisasi RASKIN menjadi RASDA	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	Wawancara
Pelaksanaan program kebijakan Beras PNS	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo	Wawancara Observasi
Hasil dari program Beras PNS Tahun 2015	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo	Wawancara
Pelaksanaan program Air-KU Kabupaten Kulon Progo	PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo	Wawancara Observasi
Hasil dari program Air-KU Kabupaten Kulon Progo	PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo	Wawancara

Pelaksanaan program TOMIRA	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Wawancara Observasi
Hasil dari TOMIRA	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dokumen-dokumen yang ada di beberapa instansi dan didukung dengan adanya catatan, laporan-laporan, buku-buku, media massa dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Tabel 2. Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Laporan produksi dan pemasaran Batik Gebleg Renteng tahun 2015	Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
Produk hukum yang berkaitan dengan Batik Gebleg Renteng	Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
Laporan produksi dan pemasaran RASDA Tahun	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo
Produk hukum yang berkaitan dengan RASDA	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo
Laporan hasil pembelian, target dan realisasi Beras PNS	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo
Produk hukum yang berkaitan dengan Beras PNS	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo

Nama Data	Sumber Data
Laporan hasil produksi, pemasaran, target dan realisasi Air-KU	PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo
Produk hukum yang berkaitan dengan program ini	PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo
Laporan pelaksanaan TOMIRA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kulon Progo
Laporan target dan realisasi TOMIRA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kulon Progo
Produk hukum yang berkaitan dengan program TOMIRA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kulon Progo
Laporan hasil peningkatan target, realisasi, produksi dan pemaksimalan pemanfaatan Batu Andesit Kulon Progo	Dinas Perusahaan Umum, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi dari responden secara langsung.

Tabel 3. Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Instansi/Jabatan
1.	Bp. Totok Sundoro, ST	Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kulon Progo
2.	Ibu Sugirin	Sembung Batik
3.	Bp. Widodo	Tom Batik
4.	Ibu Tri Yuni	Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kulon Progo
5.	Bp. Nur Rohim	Ketua GAPOKTAN Panca Manunggal
6.	Bp. Mardiyo	Ketua GAPOKTAN Among Tani
7.	Ibu Ambarwati	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kulon Progo
8.	Bp. Margiono	Koordinator GAPOKTAN Beras PNS
9.	Bp. Meiriyanto	PDAM Tirta Binangun Kab. Kulon Progo
10.	Bp. Totok Hermawan, S.E	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo
11.	Bp. Johan	Koperasi KPNS Sumber Rejeki

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Ada beberapa macam dokumen, misalnya, surat kabar, makalah-makalah, artikel-artikel, arsip-arsip, derta catatan-catatan yang berkaitan dengan penilitian. Adapun dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini telah disebutkan pada tabel data sekunder dalam penelitian ini.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan suatu obyek dari fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan secara informal sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan atau observasi terhadap obyek-obyek pelaksanaan program Bela Beli Kulon Progo.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[37]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data, dimana data yang didapatkan diklasifikasikan, digambarkan dengan kalimat dan dipisah-pisahkan kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan. Prosedur dari analisa deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut:

Bagan 4. Komponen Analisis Data

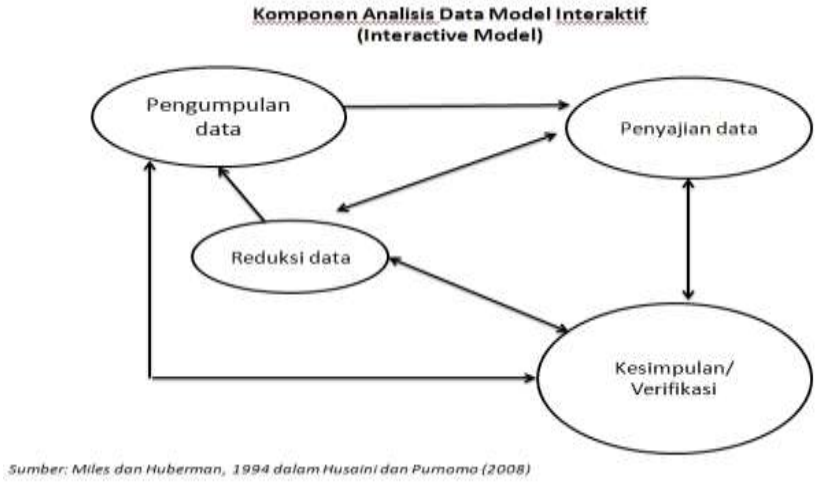

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

[37] Ibid.,hal.103 (Moleong, 2004, hal. 103)

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang didapatkan dari catatan-catatan di lapangan. Pembuatan reduksi data dilakukan dengan mengkode data dari kumpulan dokumen-dokumen data yang didapatkan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi dari data yang telah direduksi kemudian data tersebut disajikan dalam laporan yang sistematis dan juga mudah dipahami.

d. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap pemahaman makna terhadap data-data yang sudah direduksikan dalam laporan, membandungkan, menghubungkan kemudian memilih data yang merujuk pada pemecahan masalah yang akhirnya mampu menjawab permasalahan atau mendapatkan tujuan yang ingin dicapai.